RENCANA KERJA

TAHUN 2026

APBD 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN 2025

P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Salak III No. 7A. Madiun , Kode Pos : 63131
Telp. (0351) 468876
Laman : http://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.114/ 87 /2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) 2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/5/2017 Tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;

23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun ;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025
26. Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
28. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) 2025 Dinas lingkungan Hidup Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
Pada tanggal 02 Juni 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199703 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Allah Yang Maha Esa, atas kekuatan dan rahmat-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2026 ini tersusun sebagaimana mestinya.

RENJA merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang penyusunannya memuat program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2026 memuat program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Madiun. Program dan kegiatan yang termuat dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup merupakan hasil penjaringan, diskusi dan usulan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan dari masyarakat dan pokok–pokok pikiran Dewan dengan disesuaikan tugas dan fungsi masing-masing serta kebijakan yang diberikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun untuk dijadikan bahan Rencana Kinerja Anggaran (RKA).

Madiun, 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR ISI TABEL ii
DAFTAR GAMBAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . 6
2.1. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan 6
1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN 41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 44
PERANGKAT DAERAH 44
BAB V PENUTUP 46

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 2. 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 2 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 3 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 4 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 5 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 6 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 7 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 8 ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap tahun sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan atau biasa disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renja PD tidak lepas dari peran stakeholder serta pemangku kepentingan dalam penyusunan serta beberapa tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kedudukan Rencana Kerja sebagai langkah awal Rencana kerja yang dibuat berdasarkan Renstra

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang akan ditetapkan merupakan potret perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat. Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup merupakan hasil penjaringan, diskusi, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota dan usulan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dengan disesuaikan tugas dan fungsi masing-masing, serta kebijakan yang diberikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

1.2. Landasan Hukum

Secara normatif landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2026 memakai dasar Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/5/2017 Tentang pedoman

pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun ;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025;
26. Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;

28. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun adalah sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026.

Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2026 serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana kerja disusun secara efektif, responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat agar diperoleh hasil yang baik berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah. Adapun Sistematikanya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sbb:

Kata Pengantar

Daftar isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang,

1.2. Landasan Hukum,

1.3. Maksud Dan Tujuan, dan

1.4. Sistematika Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah periode 2025-2030 dengan memperhatikan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup maka didukung dengan program dan kegiatan. Program adalah gambaran dari kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari capaian sasaran yang terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan-tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa Sumber Daya Manusia atau SDM, barang modal (peralatan, teknologi, dana, dll) sebagai input untuk menghasilkan output dalam bentuk atau jasa.

Evaluasi dan analisa pencapaian program dan kegiatan dilihat dari dua pengukuran yaitu pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Hal tersebut guna untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang sudah berjalan.

Adapun evaluasi hasil Renja Progam dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH	A Skor	A Skor	A Skor	A Skor	103.73%	A Skor	A Skor	A Skor
2.11.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
2.11.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RKA/PK)	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%			
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						6 laporan	6 laporan	100%
2.11.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN						89 Orang/ bulan	66 Orang/bulan	153%
2.11.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.11.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						3 paket	3 paket	100%

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						230 Orang	230 Orang	96%
2.11.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.11.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						21 Laporan	7 Laporan	117%
2.11.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Tercukupinya Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**117%**
2.11.1.2.07.1	Pengadan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%		0 unit	0%
2.11.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2 Unit	2 Unit	50%
2.11.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**156%**
2.11.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						4 Laporan	2 Laporan	75%
2.11.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Gaji Non ASN	100%	100%	100%	100%	**100%**			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	18 Laporan	75%
2.11.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**156%**	**156%**
2.11.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/ Operasional yang Layak Digunakan	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						16 Unit	31 unit	97%

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan dan Mesin yang Layak Digunakan	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						15 Unit	44 Unit	147%
2.11.1.2.09.9	Pemelihraaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	100%	100%	100%	100%	**100%**			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						3 Unit	6 Unit	100%
2.11.2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROSENTASE DATA PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG TERSEDIA**	**71.79%**	**66.67%**	**71.79%**	**71.79%**	**100%**	**79.49%**	**72%**	**91%**
2.11.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Kabupaten/Kota)**	**Jumlah Dokumen yang Disusun**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**			
		Jumlah Data dan Informasi PPLH yang Teredia						**1 dokumen**	**3 Dokumen**	**43%**
2.11.2.2.01.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**			
		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota yang Disusun		2 dokumen				1 dokumen	4 Dokumen	57%
2.11.2.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen yang Disusun**	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah Data dan Informasi Kajian LH yang Tersedia		1 dokumen				**1 dokumen**	**2 Dokumen**	**50%**
2.11.2.2.02.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen yang Disusun	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**			
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/Kota yang Disusun						1 dokumen	4 Dokumen	133%
2.11.3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROSENTASE TITIK SAMPEL KUALITAS AIR DAN UDARA YANG MEMENUHI BATU MUTU**	**49%**	**55.9%**	**49%**	**55.9%**	**100.04%**	**50.10%**	**12%**	**25%**
2.11.3.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan/Usaha yang Dipantauh Pencegahan Pencemarannya**	**20 kali**	**20 Kali**	**78 kegiatan**	**88 kegiatan**	**1130%**	**79 Kegiatan/ Usaha**	**52 Kegiatan/Usaha**	**29%**
2.11.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media tanah air udara dan laut	15 kali	15 kali						

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dilaksanakan Terhadap Media, Tanah, Air, udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%
2.11.3.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran	3 kegiatan	3 kegiatan						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%
2.11.3.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Usaha/Kegiatan yang sudah melakukan Pengelohan Limbah Cair**	**15 Usaha/ Kegiatan**	**15 Usaha/ Kegiatan**	**15 Usaha/ Kegiatan**	**15 Usaha/ Kegiatan**	**100%**	**18 Usaha/ Kegiatan**	**9 Usaha/ Kegiatan**	**26%**
2.11.3.2.02.1	Pemberian Informasi Perinatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	10 kali	10 Kali						
		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kab/Kota yang Dilaksanakan			2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%
2.11.3.2.02.3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	100%			
		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan						2 Titik	3 Titik	75%
2.11.4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**PROSENTASE JUMLAH SPESIES KEHATI LOKAL DAERAH**	**94,32%**	**96,59%**	**94,32%**	**94,32%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**
2.11.4.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah**			**332 Spesies**	**340 Spesies**	**102%**	**342 Spesies**	**332 Spesies**	**102%**
2.11.4.2.01.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI yang Disusun						1 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**PROSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**71,5%**	**74%**	**75%**	**76%**	**101%**	**75%**	**50%**	**65%**

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.5.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Memenuhi Sayarat**	**16 lokasi**	**16 Lokasi**	**17 lokasi**	**17 lokasi**	**100%**	**17 Lokasi**	**10 Lokasi**	**59%**
2.11.5.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan/usaha yang mengurus izin	5 kegiatan/ Usaha	7 Kegiatan/ Usaha						
		Jumlah Fasilitasi Peretujuan/Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi			5 dokumen	6 dokumen	110%	5 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.11.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PROSENTASE PELAKU USAHA/ KEGIATAN YANG TAAT TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**64,7%**	**64,7%**	**76,47%**	**76,47%**	**100%**	**76.47%**	**64,7%**	**100%**
2.11.6.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**15 Perusahaan**	**15 Perusahaan**	**17 Perusahaan**	**22 Perusahaan**	**119%**	**17 Perusahaan**	**11 Perusahaan**	**65%**
2.11.6.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentian dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetuuan teknis, persetujuan lingkunganm dan surat kelayakan operasi yang diberikan			4 Dokumen	8 Dokumen	200%	8 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.11.6.2.01.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah						10 Laporan	14 Laporan	140%
		Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi						10 Badan Usaha	7 Badan Usaha	70%
2.11.8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**100%**
2.11.8.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**15 Kegiatan**	**15 Kegiatan**	**15 Kegiatan**	**15 Kegiatan**	**100%**	**15 Kegiatan**	**7 Kegiatan**	**47%**
2.11.8.2.01.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan Hidup	4 Kegiatan	4 Kegiatan						

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerapakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			4 dokumen	4 dokumen	100%	4 Dokumen	14 Dokumen	88%
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROSENTASE PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pengaduan Mayarakat terhadap (PPLH) Kab/Kota**	**5 Kasus**	**8 Kasus**	**3 kasus**	**3 kasus**	**100%**			
		Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						**5 Kasus**	**3 Kasus**	140%
2.11.10.2.01.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10 Kasus	8 Kasus						
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yang Ditindak Lanjuti/Ditangani			5 Dokumen	8 Dokumen	180%	4 dokumen	14 dokumen	88%
2.11.10.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	50 Kader	60 Kader						
		Jumlah Dokumen Hasl Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						5 perkara	4 perkara	67%
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**PROSENTASE PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**	**73%**	**72.98%**	**72%**	**72,41%**	**101%**	**71%**	**72,98%**	**100%**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah Sampah yang dikelola**	**4377 Ton**	**40520.993 Ton**	**43780 Ton**	**40507,276 Ton**	**99%**	**163697 ton**	**40520.993 Ton**	**93%**
2.11.11.2.01.2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	2 Lokasi	2 Lokasi						
		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali						2 Lokasi	2 Lokasi	79%
2.11.11.2.01.3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan,	Jumlah volume sampah yang masuk TPA	32280 Ton	29572.69 ton						

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkam, Diangkut, Diolah, Diproses akhir di TPA/ TPST/ SPA Kab/ Kota			32280 Ton	90173 Ton	70%	32280 ton	14462.708 Ton	155.17%
2.11.11.2.01.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	14 jenis	10 jenis						
2.11.11.2.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakay atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			43 kelompok	27 kelompok	62%	41 Kelompok	56 Kelompok	68%
2.11.11.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan. Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	5 Unit	83%
2.11.11.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Jumlah Pihak swasta Pengelola Sampah yang Dibina dan Diawasi**	**35 Kelompok**	**45 Kelompok**	**45 kelompok**	**45 kelompok**	**100%**	**45 Kelompok**	**74 Kelompok**	**53%**
2.11.11.2.03.2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	3 Kecamatan	3 Kecamatan						
		Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyaraka/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja			3 unit	3 unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja renstra diatas terdapat telah melaksanakan 9 Program, 18 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan pada tahun 2024 dengan total anggaran Rp. 26.915.380.276,- dengan realisasi sebesar Rp. 25,184,759,633.46,- atau 93,57% dengan demikian jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.730.620.642,54,- atau 6,43%. Pada kondisi tersebut menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu:

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
   Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tidak Terdapat realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, karena pada tahun 2023 semua program kegiatan berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%.
2. Realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan:
   Pada Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu:
   a. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
      2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
      3. Program Pengelolaan Kenekaragaman Hayati (KEHATI)
      4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
      5. Program Pengelolaan Persampahan.
   b. 1. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah.
      2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      3. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
      4. Kegiatan Pengelolaan Sampah.

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta.
6. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

c. 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.
5. Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

d. 1. Faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu:
   a. Adanya Dasar Aturan Sebagai Kebijakan Terlaksananya Kegiatan.
   b. Adanya Dukungan Anggaran.
   c. Ketersediaan sarana prasana yang menunjang.
   d. Melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan schedule.
   e. Tersedianya peraturan yang mengatur tata cara pengelolaan limbah B3.
   f. Meningkatnya kebersihan dan keindahan pada spot-spot Kota Madiun.
   g. Tersedianya peraturan yang mengatur tata cara pengelolaan limbah B3.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian renstra perangkat daerah :
   a. Program yang tidak tercapai/ memenuhi target

      Pada Dinas Lingkungan Hidup tidak terdapat program yang tidak tercapai/memenuhi target.

b. Program yang memenuhi atau melebihi target

i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target A Skor dan realisasi A skor sehingga capaian kinerja 100%, dengan pagu anggaran Rp. 18.545.013.190,- dan realisasi Rp. 17.376.792.611,87,- (93,70%).

ii. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan target 88,20% dan realisasii 90,05% sehingga capaian kinerja 102,097%, dengan pagu anggaran Rp. 264.150.000,- dan realisasi 262.247.800,- (99,27%).

iii. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, dengan pagu anggaran Rp. 715.786.000,- dan realisasi Rp. 702.610.150,- (98,16%).

iv. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, dengan pagu anggaran Rp. 247.000.000,- dan realisasi Rp. 245.706.300,- (99,47%).

v. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan target 79,50% dan realisasi 79,50% sehingga capaian kinerja 100%, dengan pagu anggaran Rp. 279.440.000,- dan realisasi Rp. 271.754.880,- (97,24%).

vi. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target 50,10% dan realisasi 64,95% sehingga capaian kinerja 129,64%, dengan pagu anggaran Rp. 1.246.691.086,- dan realisasi anggaran Rp. 1.242.891.288,- (99,69%).

vii. Program Pengelolaan Kenekaragaman Hayati (KEHATI) dengan target 100% dan realisasi 100%

sehingga capaian kinerja 100%, dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,- dan realisasi Rp. 9.486.950,- (94,86%).

viii. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan target 78% dan realisasi 78% sehingga capaian kinerja 100%, dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,- dan realisasi Rp. 50.493.565,- (98,71%)

ix. Program Pengelolaan Persampahan dengan target 71% dan realisasi 70,974% sehingga capaian kinerja 100,036%, dengan pagu anggaran Rp. 5.557.300.000,- dengan realisasi Rp. 5.023.913.153,49 (90,40%).

4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab :
   a. Pengoptimalan dan penambahan sarana dan prasarana untuk penanganan sampah
   b. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan masyarakat untuk ikut serta dalam pengurangan sampah.
   c. Adanya perubahan PK saat PAK.
   d. Pekerjaa dilaksanakan sesuai dengan schedule.
   e. Meningkatkan kualitas SDM melalui diklat dan sejenisnya yang menunjang tugas pengaduan.
   f. Perbaikan/upgrade SOP penanganan pengaduan secara berkala.
   g. Mengadakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan.
   h. Fasilitasi terhadap wajib usaha dan kegiatan.
   i. Melakukan pendampingan dan sosialisasi tentang adiwiyata khususnya dalam input data ke dalam macro excel.
   j. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
   k. Melaksanakan kegaitan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja.
   l. Adanya rencana penambahan anggaran untuk kenaikan harga BBM.

m. Pemberian informasi kepada pelaku usaha menghasil limbah B3 tentang tata cara pengelolaan limbah B3 yang benar.
n. Mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pengurangan sampah melalui 3R dan sosialisasi pengelolaan sampah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagai berikut:

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2020 yang kemudian Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan rumusan kebijakan tehnis di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lungkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan ligkungan hidup;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Tabel 2. 2 Jenis Pelayanan dan Program Pengampu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

No	Jenis Pelayanan	Program	Keterangan
1	Dokumen Lingkungan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Aplikasi
2	Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Manual
3	Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	Manual

Indikator yang menjadi Tolok ukur perangkat daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah meliputi :

1. Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Tabel 2. 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kinerja

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
URAIAN	INDIKATOR		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)
			2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
			3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	4. Prosentase penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Sumber: Perjanjian Kinerja P-APBD 2022

Dari visi, misi RPJMD Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dan Meningkatnya Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam RPJMD berkaitan erat dengan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA. RENSTRA (Rencana Strategis) dan RPJMD mempunyai target IKLH yang sama setiap tahunnya.

a. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah HASIL Pelaksanaan Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tertuang dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori Peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Implementasi
1	AA	90-100	Sangat Memuaskan
2	A	80-90	Memuaskan
3	BB	70-80	Sangat Baik
4	B	60-70	Baik
5	CC	50-60	Cukup
6	C	30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Kementerian PAN-RB 2017

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

$$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_A^2}{2}}$$

Perhitungan Indeks Kualitas Air di dapat dari hasil input uji laboratorium dari beberapa titik uji sample yang di ambil. Sample tersebut di ambil di beberapa sungai, limbah cair perusahaan, dan sumber air bersih. Dari data tersebut di input ke dalam aplikasi yang sudah di sediakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perhitungan Indeks kualitas Air tidak lagi perlu menghitung manual dengan rumus, karena hasil akan otomatis keluar secara system.

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)
IKU = 100-(50/0.9 x (Ieu – 0.1))

Perhitungan Indeks Kualitas Udara di dapat dari hasil input uji laboratorium dari beberapa titik uji sample yang di ambil. Sample tersebut di ambil di beberapa lokasi, jalan raya dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi, lokasi perumahan, lokasi taman kota, lokasi pasar, dan lokasi daerah industri. Dari data tersebut di input ke dalam aplikasi yang sudah di sediakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perhitungan Indeks Kualitas Udara tidak lagi perlu menghitung manual dengan rumus, karena hasil akan otomatis keluar secara system.

d. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan di dapat dari hasil input pemetaan penghijauan yang di ambil dari foto udara. Pemetaan di ambil pada lokasi yang terdapat vegetasinya, lokasi taman kota, hutan kota, tajuk pohon pelindung, lapangan, sepadan sungai, dll. Dari data tersebut di input ke dalam aplikasi yang sudah di sediakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan tidak lagi perlu menghitung manual dengan rumus, karena hasil akan otomatis keluar secara system.

e. Prosentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Penanganan Sampah :

$$\boldsymbol{penanganan\ sampah} = \frac{\boldsymbol{volume\ sampah\ yang\ ditangani\ dinas}}{\boldsymbol{potensi\ timbulan\ sampah}} \boldsymbol{x\ 100\%}$$

$$\boldsymbol{pengurangan\ sampah} = \frac{\boldsymbol{volume\ sampah\ yang\ ditangani\ masyarakat}}{\boldsymbol{potensi\ timbulan\ sampah}} \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Pengelolaan Sampah
= PENANGANAN SAMPAH+PENGURANGAN SAMPAH

2. Indikator Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

   Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun memiliki 9 Program, dimana Indikator Program tersebut menunjukan secara langsung keterkaitan antara program dengan indicator kinerja sehingga keberhasilan program berdasarkan rencana kegiatan tahun yang ditetapkan. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel Dinas Lingkungan Hidup, perumusan program Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indicator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangat Daerah.

      Pelaksanaan Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tertuang dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori Peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Implementasi
1	AA	90-100	Sangat Memuaskan
2	A	80-90	Memuaskan
3	BB	70-80	Sangat Baik
4	B	60-70	Baik
5	CC	50-60	Cukup
6	C	30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Kementerian PAN-RB 2017

   b. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator kinerja Prosentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.

$$\frac{\text{jumlah pelaku usaha yang mengurus rekomendasi}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha yang harus mengurus rekomendasi}} \text{x}100\%$$

   c. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat,

dengan indikator kinerja prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.

$$\frac{\text{jumlah lembaga atau instansi yag telah mendapatkan pelatihan dan penyuluhan}}{\text{Jumlah seluruh lembaga atau instansi yang mengikuti pelatihan dan peyuluhan}} \text{x100\%}$$

d. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan indicator prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup

$$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani}} \text{x100\%}$$

e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup , dengan indicator Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia

$$\frac{\text{Jumlah data dan Informasi yang tersedia atau dapat diakses}}{\text{Total jumlah data dan informasi}} \text{x100\%}$$

f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu

$$\frac{\text{Jumlah Titik Sampel yang Memenuhi Baku Mutu}}{\text{Jumlah Tiik Sampel Seluruhnya}} \text{x100\%}$$

g. Program Pengelolaan Kenekaragaman Hayati (KEHATI), dengan indicator Prosentase Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah

$$\frac{\text{Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah yang ada}}{\text{Total Spesies KEHATI Lokal Daerah}} \text{x100\%}$$

h. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3), dengan indicator prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

$$\frac{\text{jumlah pelaku usaha yang mempunyai TPS B3}}{\text{jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang dipantau}} \text{x100\%}$$

i. Program Pengelolaan Persampahan, dengan indicator Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

$$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani Dinas}}{\text{Total Volume Timbunan Sampah Kab atau Kota}} \text{x100\%}$$

3. Indikator LPPD yang di ampu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

   LLPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada LLPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; laporan penerapan standart pelayanan minimal; dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) indicator kunci (outcome) dalam pengukuran kinerja yaitu

Tabel 2. 4 Rumusan Indikator Kinerja LPPD

No	Indikator Kinerja	Rumus
2.j.1	IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota
	1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a. Indeks Kualitas Air (IKA)	Hasil Perthitungan Kabupaten/Kota terhadap: a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)

No	Indikator Kinerja	Rumus
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	
2.j.2	Terlaksanaya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten /Kota	$\frac{Total\ volume\ sampah\ yang\ dapat\ ditangani}{Total\ volume\ timbunan\ sampah\ kabupaten/kota}$
	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{jumlah\ penanggung\ jawab\ usaha\ dan\ atau\ kegiatan\ terhadap\ izin\ lingkungan, izin\ PPLH\ dan\ PUU\ LH\ yang\ diterbitkan\ oleh\ Pemerintah\ Kab\ Kota}{Usaha\ dan\ atau\ Kegiatan\ Dilakukan\ Pemeriksaan}$
	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{izin\ lingkungan, izin\ PPLH\ dan\ PUU\ LH\ yang\ diterbitkan\ oleh\ Pemerintah\ Daerah\ Kab\ atau\ kota}{Jumlah\ usulan\ permohonan\ yang\ terregistrasi} x100\%$
	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota	$\frac{Jumlah\ PPLHD\ yang\ ada}{Jumlah\ usaha\ dan\ atau\ kegiatan\ yang\ izin\ lingkungan, izin\ PPLH\ dan\ PUU\ LH\ diterbitkan\ oleh\ pemerintah\ daerah\ kab\ kota} x100\%$
	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kab kota	$\frac{jumlah\ MHA\ yang\ diakui}{Jumlah\ usulan\ MHA} x100\%$

No	Indikator Kinerja	Rumus
	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{Jumlah\ MHA\ yang\ mendapat\ pelatihan}{Jumlah\ MHA\ yang\ ada} x100\%$
	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{Jumlah\ lembaga\ kemasyarakatan\ yang\ diberikan\ diklat\ atau\ rencana\ target\ lembaga\ kemasyarakatan\ yang\ akan\ diberikan\ diklat}{} x100\%$
	6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha da dampaknya di Daerah Kab/Kota yang ditangani	$\frac{Pengaduan\ masyarakat\ yang\ ditangani}{total\ jumlah\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ teregistrasi} x100\%$

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	tahun n-2	tahun n-1	tahun n	tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				√		A Skor	A Skor	A Skor	A Skor	A Skor	A Skor	A Skor	A Skor	Tercapai
2.	Prosentase data perencanaan lingkungan hidup yang tersedia				√		79.50%	79.50%	79,50%	79,50%	79,49%	72%	79,50%	79,50%	Tercapai
3.	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu				√		50%	50.10%	50%	50.10%	52,67%	49,23%	50%	50.10%	melebihi target
4	Prosentase jumlah spesies KEHATI lokal daerah				√		100%	100%	100%	100%	100%	96,59%	100%	100%	Melebihi target
5	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)				√		78%	75%	78,20%	78,20%	76%	74%	78,20%	78,20%	Melebihi Target
6	Indeks RB			√			15.9	15.92	15.92	15.92	23.42	15.92	15.92	15.92	Melebihi Target
7	Indeks Kualitas Air (IKA)			√			51.31	51.32	50	50,10	50	-	50	50,10	Tidak Tercapai
8	Indeks Kualitas Udara (IKU)			√			83.09	83.25	83.15	86,16	84.17	-	83.15	86,16	Melebihi Target
9	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			√			22,42	24,16%	24,17%	24,18%	23,94	-	24,17%	24,18%	Melebihi Target

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	tahun n-2	tahun n-1	tahun n	tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Prosentase penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga			√			99%	99%	99,2%	99,3%	99%	99,01%	99,2%	99,3%	Melebihi Target
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		√				57,85	57,93	57,94	57,95	58.13	-	57,94	57,95	Melebihi Target
12	Prosentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				√		88.20%	88.20%	88,20%	88,20%	64.70%	83,52%	88,20%	88,20%	Tercapai
13	Prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ligkungan hidup untuk masyarakat				√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
14	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga				√		71%	71%	99,2%	99,3%	72.98%	99,01%	99,2%	99,3%	Melebihi Taget
15	IKLH					√	58.13	57,93	57,94	57,95		-	57,94	57,95	Tercapai
16	1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a. Indeks Kualitas Air (IKA)					√	f. 53,59 g. 81,72 h. 50,45	a. 53,69 b. 81,82 c. 51,55	a. 50,00 b. 86,15 c. 24,17	a. 50,10 b. 86,16 c. 24,18	a. 51,43 b. 87,94 c. 24,16	-	a. 50,00 b. 86,15 c. 24,17	a. 50,10 b. 86,16 c. 24,18	Tercapai

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	tahun n-2	tahun n-1	tahun n	tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)														
17	Terlaksanaya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten /Kota					√									
18	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota					√									
19	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					√									
20	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota					√									
21	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan					√									

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	tahun n-2	tahun n-1	tahun n	tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	oleh pemerintah Kabupaten/ Kota														
22	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kab kota					√									
23	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH					√									
24	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat					√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
25	6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha da dampaknya di Daerah Kab/Kota yang ditangani					√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
26	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Dilihat berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu:

Tabel 2. 6 Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				√		-	1. Koordinasi yang baik antara pengelola sarana dan prasarana 2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan schedule
2.	Prosentase data perencanaan ligkungan hidup yang tersedia				√		1. Kurangnya ketersediaan data 2. Masih banyak masyarakat/ penanggung jawab kegiatan belum menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan	1. Ketersediaan dana dan sarana prasarana yang menunjang 2. Ketersediaan dana yang mencukupi 3. Ketersediaan SDM yang berkompeten
3.	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu				√		Masih banyak masyarakat/ penanggung jawab kegiatan belum menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan	Ketersediaan dana yang mencukupi
4	Prosentase jumlah spesies KEHATI lokal daerah				√		Kurangnya ketersediaan data	Ketersediaan dana dan sarana prasarana yang menunjang

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
5	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)				√		1. Kurangnya pengetahuan pemilik kegiatan usaha terkait persyaratan TPS limbah B3 yang benar 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	1. Penambahan peraturan yang memudahkan pelaku usaha terkait penyimpanan limbah B3 2. Dilakukan pemantauan dan pembinaan pengelolaan limbah B3
6	Indeks RB			√			Ketersediaannya Sarana dan Prasarana yang Menunjang	Ketersediaan Dana dan SDM yang Berkompeten
7	Indeks Kualitas Air (IKA)			√			1. Masih banyak masyarakat/ Penanggung Jawab Kegiatan Belum Menyadari Pelestarian Fungsi Lingkungan	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo (utamanya di musim kemarau) 2. Mendorong pembangunan pengolahan limbah komunal bagi masyarakat dan industri (kecil) yang berbasis masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya 3. Sosialisasi bagi industri-industri agar memasang alat monitoring air limbah secara

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
								otomatis yang dibuang ke badan air 4. Mensosialisasikan bagi industri-industri yang belum memiliki izin pembuangan air limbah yang dibuang ke badan sungai 5. Berkoordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Timur terhadap pemodelan tersebut sebagaimana Rekomendasi Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bengawan Solo Nomor : 18/TKPSDAWSBS/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo.

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
8	Indeks Kualitas Udara (IKU)			√			Masih banyak masyarakat/ Penanggung Jawab Kegiatan Belum Menyadari Pelestarian Fungsi Lingkungan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja
9	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			√			Masih minimnya masyarakat untuk Menyadari Pelestarian Fungsi Lingkungan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja
10	Prosentase penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga			√			1. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik 2. Peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah belum optimal	1. Sarana dan prasarana untuk penanganan sampah memadai 2. Telah terbentunknya lembaga-lembaga bank sampah di masyarakat
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		√				Masih minimnya masyarakat untuk Menyadari Pelestarian Fungsi Lingkungan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja
12	Prosentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				√		1. Kurangnya kesadaran wajib usaha/kegiatan untuk mengurus perijinan 2. Regulasi peraturan-peraturan berubah-ubah	1. Pembinaan dan pengawasan terhadap wajib usaha

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
13	Prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ligkungan hidup untuk masyarakat				√		1. SDM sekolah yang kurang mengerti dan memahami dalam input daya ke dalam macro excel ADIWIYATA	1. Dapat diterimanya ilmu dan pengetahuan tentang ADIWIYATA oleh SDM seklolah-sekolah yang mengusulkan untuk maju ADIWIYATA
14	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga				√		1. Kurangnya jumlah personel (SDM) yang mengolah sampah di TPS 3R 2. Banyaknya tenaga lapangan kebersihan yang purna tugas	1. Adanya peran serta masyarakat dalam daur ulang sampah melalui bank sampah 2. Adanya pembagian system kerja yang baku dan dipahami oleh tenaga upahan
15	IKLH					√	Masih minimnya masyarakat untuk Menyadari Pelestarian Fungsi Lingkungan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
16	1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)					√	Masih minimnya masyarakat untuk Menyadari Pelestarian Fungsi Lingkungan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja
17	Terlaksanaya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota					√	1. Kurangnya jumlah personel (SDM) yang mengolah sampah di TPS 3R 2. Banyaknya tenaga lapangan kebersihan yang purna tugas	1. Adanya peran serta masyarakat dalam daur ulang sampah melalui bank sampah 2. Adanya pembagian system kerja yang baku dan dipahami oleh tenaga upahan
18	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota					√	Kurangnya ketersediaan data	Sarana prasarana yang menunjang

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
19	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					√	1. Kurangnya kesadaran wajib usaha/kegiatan untuk mengurus perijinan 2. Regulasi peraturan-peraturan berubah-ubah	1. Pembinaan dan pengawasan terhadap wajib usaha
20	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota					√	1. Regulasi peraturan-peraturan berubah-ubah 2. Kurangnya ketersediaan data	Pembinaan dan pengawasan terhadap wajib usaha
21	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota					√	DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIDAK MEMLIKI PPLHD	
22	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kab kota					√	DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIDAK MEMLIKI MHA	
23	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan					√	DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIDAK MEMLIKI MHA	

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
	dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH							
24	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat					√	SDM yang kurang berkompeten dibidangnya	Pembelajaran dan Ilmu yang diberikan mudah dipahami
25	6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha da dampaknya di Daerah Kab/Kota yang ditangani					√	1. Belum adanya pejabat/ PPLHD dan SDM Teknis/ Pendukung yang berkompeten menangani pengaduan 2. Kurang lengkapnya data/ Informasi dari dari pihak pengadu	Adanya dasar aturan sebagai pijakan terlaksananya kegiatan
	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup						1. Belum adanya pejabat/ PPLHD dan SDM Teknis/ Pendukung yang berkompeten menangani pengaduan 2. Kurang lengkapnya data/ Informasi dari dari pihak pengadu	Adanya dasar aturan sebagai pijakan terlaksananya kegiatan

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Penting serta rekomendasi dan catatan yang strategis dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas:

1. Isu Penting
    a. Meningkatnya pencemaran baik tanah, air dan udara akibat adanya penambahan jumlah industri/kegiatan usaha lainnya
    b. Masih banyak masyarakat/usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan belum memenuhi persyaratan administrative dan teknis tentang pengelolaan B3 atau limbah B3 sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
2. Rekomendasi Catatan
    a. Lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi berkenaan dengan lingkungan baik air, tanah dan udara.
    b. Dengan Masih banyak masyarakat/usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan belum memenuhi persyaratan administrative dan teknis tentang pengelolaan B3 atau limbah B3 maka banyak hal yang harus dilakukan baik dengan sosialisasi, koordinasi ataupun pendekatan – pendekatan ,dll

Isu – isu dan masalah dikaitkan dengan permasalahan pembangunan Nasional dan pembangunan Propinsi Ditinjau dari masalah isu pembangunan nasional dan propinsi yang menitik beratkan pada penurunan angka kemiskinan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan produksi pertanian, investasi dan daya saing eksport, kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan masyarakat, penanggulangan banjir dan resiko bencana serta peningkatan infrastruktur.

Berpijak dari isu- isu masalah diatas maka untuk pembangunan Kota Madiun tahun 2026 memfokuskan pada pembangunan yang berorientasi partisipasi masyarakat, good gavernance, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

secara luas dimana yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup yaitu pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dengan sasaran meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diambil dari Renstra Perangkat daerah pada Tahun Berkenaan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa kebutuhan didasarkan pada evaluasi kinerja Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan dan identifikasi isu – isu penting yang telah dibagankan dalam bentuk Pohon Kinerja Perangkat Daerah.

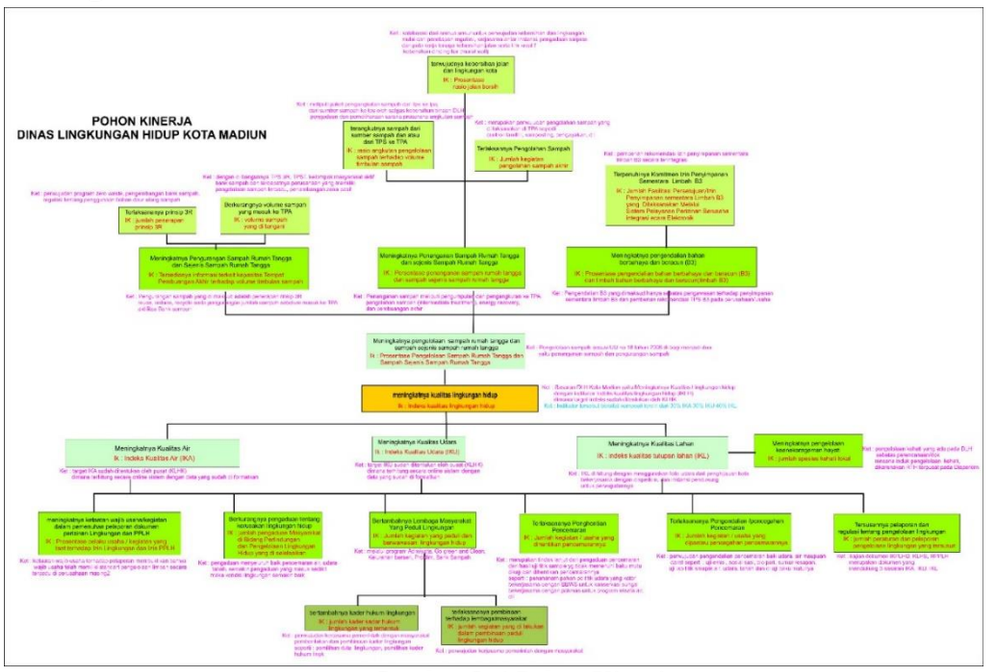

Gambar 2. 1 Pohon Kinerja

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dan mendukung arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:

1. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak dan terjaga, memanfaatkan lingkungan hidup secara produktif, efisien dan optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lungkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan ligkungan hidup;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tidak terdapat perubahan tujuan dan sararan pada rencana kerja. Tujuan dan Sasaran RENJA dengan Tujuan dari RENSTRA 2025-2030 yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan

indikatornya “Indeks kualitas lingkungan hidup”. Sedangkan dalam Rancangan RENSTRA 2025-2030 sasaran adalah:

Tabel 3. 1 Sasaran, Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR
1	2	3
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)
		3. Indeks Kualitas Udara (IKU)
		4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	5. Prosentase penngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksnaan Urusan Pemerintahan yang ada di Daerah, sehingga perlu merumuskan apakah Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan mendukung pencapaian diantaranya

Dari hasil identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, maka pada Tahun 2026 usulan yang diajukan dalam Renja Perangkat Daerah:

1. Jumlah Usulan :

a.	Program	:	9 Program
b.	Kegiatan	:	13 Kegiatan
c.	Sub Kegiatan	:	31 Sub Kegiatan
d.	Pagu Anggaran	:	Rp. 27.003.030.783,-
e.	Sumber Pendanaan	:	APBD
f.	APBD	:	Rp. 27.003.030.783,-
g.	Lokasi Kegiatan	:	Kota Madiun

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun 2026 yang harus didukung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah :

1. Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3. Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusifitas Sosial
4. Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Madiun Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil (Sasaran)	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Sasaran)				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)

Catatan : Format SIPD

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renja Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder terkait, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, arahan prioritas pembangunan dan Rencana Strategis maka Tujuan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2026 adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dimana untuk melakukan Rencana Kerja secara bertahap terhadap pelaksanaan tugas yang akan dilakukan. Upaya ini dilakukan untuk meraih perbaikan-perbaikan yang menuju pada sistem pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan sasaran Meningkatna Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Pengelolaan Sampah.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun disusun sebagai dokumen pendukung dan penyelarasan dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2026, sebagaimana telah diuraikan dalam Rencana Kerja sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas-tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup telah dapat di susun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun demikian Rencana Kerja dalam pelaksanaannya masih diperlukan adanya peningkatan khususnya pada Rencana Kerja serta koordinasi antar bidang sehingga akan dapat dicapai kinerja yang terintegrasi.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199703 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	50,00
		Indeks Kualitas Udara	86,15
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,17
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	99,2%

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690913 199703 1 005